



Peringatan Hari HAM Internasional 2018

... dan Di ... AM dan Setelah ...  
 ... dan ...  
 ... " ...

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

**Ketua** Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik menyerahkan rekomendasi berkaitan dengan penyelesaian masalah HAM kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri peringatan Hari HAM Internasional 2018 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Salah satu isi rekomendasi itu meminta pemerintah segera memastikan Jaksa Agung menggunakan kewenangan penyidikan atas 10 kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu.

# Pemerintah Terus Tegakkan HAM

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemenuhan hak asasi manusia selalu menjadi perjuangan Indonesia. Banyak hal telah membuktikan komitmen itu.

**JAKARTA, KOMPAS** — Setelah dua puluh tahun memasuki era keterbukaan, penanganan sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Tanah Air belum terselesaikan. Namun, hal itu bukan berarti pemerintah abai terhadap perjuangan penegakan HAM.

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berpidato dalam peringatan Hari HAM Internasional 2018 di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Selasa (11/12/2018), kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam memenuhi dan menegakkan HAM. Wapres mengatakan, sejak awal kemerdekaan, pemenuhan HAM menjadi salah satu perjuangan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.

Pemerintah Indonesia meng-

gagas Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 yang menjadi tonggak perjuangan bangsa-bangsa Asia dan Afrika menuntut pemenuhan hak kemerdekaan. "Justru Indonesia punya peran penting untuk HAM. Melalui KAA 1955 timbul kesadaran tinggi negara-negara Asia dan Afrika melawan penjajahan untuk memenuhi hak merdeka," ujar Wapres.

Tak hanya itu, setelah reformasi 1998, pemerintah bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat menyempurnakan pasal mengenai HAM dalam konstitusi. Kalla menjelaskan, ada 10 ayat dalam Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur hak dasar warga negara. Hak dasar itu mulai dari hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, membentuk keluarga, mendapatkan pendidikan, perlakuan yang sama di hadapan hukum, memeluk

agama dan beribadah, berserikat dan berkumpul, hingga bebas dari perlakuan diskriminatif.

"Saya kira di antara negara-negara ASEAN, kita tidak kekurangan upaya untuk menjaga HAM dengan baik, baik secara undang-undang maupun pelaksanaannya," ujar Kalla.

Komitmen pemerintah dalam menjaga HAM juga dibuktikan dengan membentuk Komnas HAM serta kementerian khusus menangani hukum dan HAM. Lembaga itu dibentuk untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat sebagai warga negara ataupun manusia.

## Penyelesaian

Meski demikian, Komnas HAM menilai masih banyak persoalan HAM belum terselesaikan, antara lain kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa

lalu, pelaksanaan reforma agraria, serta penanganan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme dengan kekerasan.

Terkait pelanggaran HAM berat, Komnas HAM meminta Presiden Joko Widodo memastikan Jaksa Agung Prasetyo melakukan penyidikan sebagai tindak lanjut penyelidikan Komnas HAM. Upaya lain yang direkomendasikan adalah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) kendati Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

"Mengingat mendesaknya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu, Presiden dapat mengeluarkan perppu sebagai payung hukum pembentukan KKR," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. (NTA)